

DPRD Menerima LKPj Wali Kota TA 2010



KETUA DPRD HARTONO AZAS, LMBA DIDAMPINGI TIGA PIMPINAN DPRD BERSAMA WALI KOTA PONTIANAK SUTARMIDJI, SH, M.HUM MENANDATANGI LKPJ WALI KOTA.



PIMPINAN DPRD KOTA PONTIANAK SAAT PEMBAHASAN LKPJ WALI KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pontianak, BERKAT.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2010 yang menggondol kata wajar dengan pengecualian (WDP) setelah diaudit BPK-RI, dinilai kalangan DPRD sudah cukup baik dari tahun sebelumnya, karena untuk hasil audit kali ini, BPK-RI tidak menemukan indikasi kerugian negara.

"Kita menerima LKPj Wali kota TA 2010. Namun, BPK-RI menemukan sejumlah pengecualian yang bermasalah, terutama dalam pencatatan aset yang masih selalu menjadi kelemahan Pemerintah Kota

Pontianak yang harus diperbaiki lagi dan lagi," kata Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas.

Ia menuturkan, laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2010 yang sudah diaudit BPK ini dilakukan untuk melihat apakah sesuai dengan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah dan pendek.

"Nantinya kita akan lakukan evaluasi dilakukan oleh Badan Anggaran, sehingga kinerja yang disepakati apakah bisa tercapai atau belum pada tahun 2010 itu. Kita juga akan melakukan pencocokan

dengan pembahasan awal anggaran dengan kinerja atau output dari pemkot, antara lain apakah angka kemiskinan berkurang atau tidak, bagaimana indeks manusia Kota Pontianak, bagaimana derajat kesehatan masyarakat Pontianak dan bagaimana kinerja laporan keuangan. Hasilnya, kita mendapat status wajar dengan pengecualian, ada beberapa pengecualian kecil saja dari BPK dan ini artinya tidak ada penyimpangan yang mengakibatkan kerugian daerah, seperti penganggaran untuk bantuan siswa miskin," paparnya.

Sementara yang perlu dikoreksi dari audit BPK sebagai bentuk wajar dengan pengecualian ada beberapa item, tetapi

kata Ketua DPC Demokrat Kota Pontianak ini tidak ada yang merugikan daerah, hanya kepatutan kepada sistem hingga pengendalian internal.

"Dengan catatan saran untuk pencatatan penganggaran harus ada Standar Operational Procedur (SOP) di SKPD tertentu, kemudian penyertaan modal harus disertai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal, dan ada beberapa hal tertib administrasi pengelolaan daerah, hingga aset pembangunan mengenai ganti rugi yang harus dibenahi dengan legalitas yang ada," jelas Hartono.

Masalah aset menjadi catatan paling sering dari pemkot, mengingat permasalahan aset menjadi catatan pengecualian dari BPK-RI ini. Hal sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Arif Joni Prasetyo.

Menurutnya, WDP, khususnya pengecualian-pengecualian itu diharapkan tidak ada lagi, terutama dengan melakukan perbaikan, diantaranya meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD, terkait metode pelaksanaan anggaran maupun lainnya.

"Kita akan mendalami, bersamaan LHP BPK ini. Pengecualian dari BPK RI ini akan menjadi sorotan kita, terutama dari PKS,"

ungkapnya.

Diakuinya, pengelolaan aset memang selalu bermasalah setiap tahun. Lambannya BPN untuk sertifikasi juga SDM penanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dari Sekda yang harus ditingkatkan.

"Masalah aset selalu menjadi masalah, faktor lainnya dari BPN, makanya kita akan bahas lebih mendalam supaya kita mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP)," tambahnya. *(Bag Perundang-undangan dan Humas DPRD Kota Pontianak/wti)*